

PERAN WIRAUSAHA LOKAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN AREA UMUM SEBAGAI DAYA TARIK DESTINASI WISATA BERKELANJUTAN TAPIAN TABIANG BARASOK BUKITTINGGI

Sylvi Nezi Azwita^{1)*}, Rozi Yuliani,²⁾ Eddi Novra³⁾

^{1)*}UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia, sylvineziusmb@gmail.com

²⁾ UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia, rozi.rocky@gmail.com

³⁾ UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia, eddinovra01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas isu krusial mengenai keterlibatan wirausaha lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam konteks perencanaan dan pengelolaan area umum yang menjadi daya tarik destinasi wisata. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran aktif wirausaha lokal dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata melalui pengelolaan fasilitas publik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku wirausaha lokal yang beraktivitas di sekitar area wisata Tapian Tabiang Barasok, Bukittinggi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam aktivitas pariwisata lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wirausaha lokal memainkan peran penting dalam pemeliharaan kebersihan, penyediaan fasilitas penunjang, serta pengembangan atraksi lokal berbasis budaya dan lingkungan. Namun, keterbatasan akses terhadap kebijakan perencanaan, minimnya dukungan pendanaan, serta koordinasi yang belum optimal dengan pihak pemerintah menjadi kendala utama yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan wirausaha lokal dalam pengelolaan area umum dapat memperkuat nilai keberlanjutan destinasi, asalkan didukung dengan kebijakan kolaboratif, pelatihan manajerial, dan kemitraan strategis antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: *wirausaha lokal, destinasi wisata berkelanjutan, area umum, pengelolaan pariwisata, partisipasi masyarakat*

Abstract

This study addresses the critical issue of local entrepreneurs' involvement in sustainable tourism development, particularly in the planning and management of public spaces that serve as key attractions in tourist destinations. The main objective of this research is to analyze the extent of local entrepreneurs' active roles in supporting destination sustainability through the management of public facilities, and to identify the challenges and opportunities they encounter in the process. A qualitative research approach was employed using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving local entrepreneurs operating around the Tapian Tabiang Barasok tourist area in Bukittinggi. Informants were purposively selected based on their active participation in local tourism activities. The findings indicate that local entrepreneurs play a vital role in maintaining cleanliness, providing supporting facilities, and developing local attractions based on cultural and environmental values. However, limited access to planning policies, insufficient funding support, and suboptimal coordination with government authorities remain significant challenges. The study concludes that empowering local entrepreneurs in managing public areas can enhance the sustainability of tourist destinations, provided that it is supported by collaborative policies, managerial training, and strategic partnerships among business actors, communities, and local governments.

Keywords: local entrepreneurship, sustainable tourism destination, public space, tourism management, community participation

PENDAHULUAN

Pariwisata masa kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas kunjungan ke atraksi-atraksi utama seperti objek alam, situs budaya, atau wahana hiburan. Lebih dari itu, pariwisata kini menuntut pengalaman yang holistik, yang mencakup kenyamanan, interaksi sosial, dan keterhubungan dengan lingkungan destinasi. Dalam konteks ini, keberadaan ruang publik seperti taman, jalur pedestrian, area kuliner terbuka, dan titik-titik pemandangan menjadi elemen penting yang mendukung kualitas pengalaman wisatawan. Ruang-ruang ini tidak hanya menjadi tempat transit atau istirahat, tetapi juga memainkan peran sebagai ruang interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, yang pada gilirannya memperkuat citra dan daya tarik destinasi.

Pariwisata pada era kontemporer mengalami transformasi signifikan, tidak hanya dalam bentuk aktivitas perjalanan dan kunjungan ke atraksi utama, tetapi juga dalam cara wisatawan mengalami dan berinteraksi dengan ruang destinasi secara keseluruhan. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam studi pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pentingnya ruang publik (*public space*) sebagai komponen integral dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan (Gehl, 2011; Timothy & Boyd, 2015). Ruang publik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat keterikatan emosional wisatawan dengan destinasi, sekaligus memberikan ruang aktualisasi dan penghidupan bagi masyarakat lokal.

Kenyamanan dan daya tarik ruang publik tidak tercipta dengan sendirinya. Diperlukan perencanaan, pengelolaan, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan destinasi wisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat lokal, termasuk pelaku wirausaha, merupakan unsur yang sangat krusial. Wirausaha lokal, dengan kepentingannya terhadap keberlangsungan ekonomi mikro dan kedekatannya dengan komunitas, memiliki potensi besar dalam mendukung perawatan dan pengembangan ruang publik. Tidak hanya dalam bentuk kontribusi material, keterlibatan mereka juga tampak dalam inisiatif-inisiatif sosial, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan fasilitas pendukung wisatawan, hingga menciptakan atmosfer yang ramah dan inklusif.

Fenomena tersebut mulai terlihat di destinasi wisata *Tapian Tabiang Barasok* di Bukittinggi. Kawasan ini dikenal sebagai ruang terbuka yang menarik perhatian wisatawan karena keindahan alam dan suasana lokalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya partisipasi aktif sejumlah wirausaha lokal dalam mengelola dan memperbaiki area publik di sekitarnya. Mereka menyediakan tempat duduk, menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan titik swafoto (*spot selfie*), hingga menata kios-kios dagang secara lebih tertib. Namun, upaya ini sebagian besar masih berlangsung secara informal dan belum terintegrasi dalam kerangka perencanaan destinasi oleh pihak otoritas atau lembaga pengelola pariwisata.

Namun demikian, dalam praktiknya, ruang partisipasi bagi pelaku wirausaha lokal dalam perencanaan tata ruang destinasi masih sangat terbatas. Banyak kebijakan pariwisata cenderung berfokus pada pembangunan fisik dan investasi skala besar, sementara aspek pengelolaan ruang-ruang kecil dan mikro—yang justru menjadi titik interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat—kurang mendapatkan perhatian (Richards, 2016). Hal ini mengakibatkan pengelolaan ruang publik kerap dilakukan secara sporadis, tanpa sinergi yang jelas antara aktor-aktor lokal, baik dari sektor usaha, komunitas, maupun pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimaksimalkan. Ketika peran wirausaha lokal tidak diakomodasi secara sistematis, maka kontribusi mereka tidak hanya menjadi terfragmentasi, tetapi juga rawan terhambat oleh regulasi atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih jauh bagaimana wirausaha lokal berperan dalam perencanaan dan pengelolaan area umum, apa motivasi serta tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana sinergi dapat dibangun antara mereka dengan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian mengenai peran aktor non-pemerintah dalam pembangunan ruang publik sebagai daya tarik destinasi wisata berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial, perilaku, dan pengalaman para pelaku wirausaha lokal dalam perencanaan dan pengelolaan area umum sebagai daya tarik wisata. Pendekatan ini

dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan praktik sosial yang tidak dapat diungkap secara kuantitatif (Creswell, 2014). Fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman kontekstual terhadap fenomena partisipasi wirausaha lokal di ruang publik pariwisata.

Lokasi penelitian ditetapkan di Tapian Tabiang Barasok, Bukittinggi, sebuah kawasan wisata berbasis alam yang berkembang secara organik dan didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif, berdasarkan pertimbangan bahwa kawasan ini menunjukkan dinamika keterlibatan wirausaha lokal dalam pengelolaan ruang publik tanpa adanya intervensi formal dari pemerintah.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 wirausaha lokal, 2 perangkat nagari (pemerintah lokal), dan 5 wisatawan yang dipilih secara purposive. Kriteria pemilihan wirausaha didasarkan pada keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi di sekitar area publik dan kontribusinya terhadap pengelolaan fasilitas umum. Perangkat nagari dipilih sebagai representasi pemerintah lokal yang memiliki kewenangan dalam tata kelola wilayah. Sementara itu, wisatawan dipilih untuk memberikan perspektif dari sisi pengguna ruang publik, khususnya dalam hal kenyamanan, pelayanan, dan persepsi terhadap kualitas kawasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali narasi pribadi dan pengalaman subjektif informan, sedangkan observasi memungkinkan peneliti menangkap situasi faktual di lapangan, seperti tata letak area umum, interaksi antar pelaku, serta aktivitas wirausaha. Dokumentasi digunakan untuk merekam elemen visual dan tertulis sebagai pelengkap dan penguat data lainnya.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, mengikuti langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, hingga penemuan tema-tema utama (Braun & Clarke, 2006). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data dikategorikan berdasarkan pola-pola yang muncul dari narasi informan dan observasi lapangan. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk mengungkap makna yang lebih dalam terkait peran, tantangan, serta strategi wirausaha lokal dalam konteks pengelolaan area umum pariwisata.

Penelitian ini menjaga validitas data melalui teknik triangulasi sumber (antara wirausaha, perangkat nagari, dan wisatawan), serta konfirmasi hasil sementara kepada beberapa informan utama (member check) guna memastikan akurasi interpretasi peneliti. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual terhadap peran wirausaha lokal dalam penguatan destinasi wisata berbasis ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Wirausaha Lokal dalam Perencanaan Area Umum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan wirausaha lokal dalam perencanaan ruang publik sebagian besar berlangsung secara informal dan belum terinstitusionalisasi dalam kerangka tata kelola destinasi. Dari sepuluh informan, enam orang (60%) secara aktif memberikan masukan atau saran kepada tokoh masyarakat dan pengelola wisata informal, namun tidak dalam forum atau mekanisme yang resmi. Hanya dua informan (20%) yang pernah terlibat langsung dalam musyawarah nagari yang membahas pengelolaan ruang wisata. Sementara dua lainnya (20%) sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan.

Hal ini mencerminkan adanya bentuk partisipasi pasif hingga semi-aktif yang bersifat spontan, berdasarkan relasi sosial dan kepentingan praktis di lapangan. Beberapa wirausaha bahkan menjadi inisiator desain ruang, seperti usulan pembuatan spot foto, pemasangan lampu taman, hingga papan informasi sederhana, yang menunjukkan kreativitas dan kepedulian terhadap estetika lingkungan wisata. Namun, minimnya respon terhadap usulan mereka menunjukkan adanya jarak struktural antara pelaku usaha lokal dan pihak pengelola kebijakan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang destinasi masih berada pada tingkat tokenistik, sebagaimana diidentifikasi Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation. Keterlibatan mereka belum mencapai tingkat kemitraan sejati (partnership) yang memungkinkan proses perencanaan dilakukan secara kolaboratif.

2. Kontribusi dalam Pengelolaan dan Perawatan Area Umum

Meskipun tidak terlibat secara formal dalam perencanaan, kontribusi wirausaha lokal dalam pengelolaan ruang publik terbilang signifikan. Delapan dari sepuluh informan (80%) menyatakan

secara rutin menyapu area sekitar usaha, sementara enam orang (60%) menyediakan tempat sampah sendiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Tidak sedikit yang secara mandiri melakukan pengecatan pagar, menghias taman mini, dan menjaga fasilitas seperti kursi dan lampu penerangan umum.

Kontribusi ini menunjukkan bahwa wirausaha lokal memiliki sense of place dan sense of ownership terhadap area publik tempat mereka beraktivitas. Mereka menyadari bahwa keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada kenyamanan dan daya tarik lingkungan fisik yang bersih dan terawat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan (WU7), wisatawan lebih menyukai area yang bersih, estetik, dan nyaman.

Aktivitas pengelolaan ini mengilustrasikan praktek tata kelola mikro berbasis komunitas, yang meskipun bersifat informal, namun memiliki dampak nyata terhadap kualitas ruang wisata. Dalam konteks teori pariwisata berkelanjutan, kontribusi semacam ini merepresentasikan prinsip bottom-up management, di mana pelaku lokal memiliki kapasitas untuk turut menjaga daya dukung destinasi.

3. Tantangan dan Peluang

Meskipun kontribusi wirausaha lokal tergolong tinggi, mereka menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya sistem kolaboratif resmi antara pelaku usaha dan pemerintah nagari (80%). Hal ini menyebabkan tidak adanya ruang dialog yang permanen, yang dapat menjembatani gagasan lokal dengan arah kebijakan pengelolaan destinasi.

Kurangnya dukungan pemerintah (70%) dan keterbatasan dana pribadi (50%) juga menjadi kendala signifikan yang membatasi ruang gerak wirausaha dalam menjaga fasilitas umum secara berkelanjutan. Selain itu, kurangnya pelatihan tentang tata kelola ruang publik (60%) menunjukkan adanya kebutuhan kapasitas manajerial yang belum terpenuhi. Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan, hal ini menjadi hambatan dalam mendorong aktor lokal menjadi co-manager destinasi.

Namun demikian, terbuka sejumlah peluang yang dapat dimaksimalkan. Potensi dukungan dari program CSR perusahaan lokal, pelibatan LSM lingkungan, serta pengembangan model ekowisata berbasis komunitas menjadi opsi strategis untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan keterlibatan wirausaha lokal. Sinergi lintas-sektor ini penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta menciptakan tata kelola kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika lokal.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa wirausaha lokal memegang peran sentral dalam perawatan dan pengelolaan area umum destinasi wisata, meskipun partisipasi mereka dalam perencanaan formal masih terbatas. Keterlibatan ini muncul bukan karena paksaan regulatif, melainkan sebagai bagian dari kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, dan motivasi ekonomi. Wirausaha lokal menyadari bahwa kualitas lingkungan destinasi berkorelasi langsung dengan kenyamanan wisatawan, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan usaha mereka.

Mereka melakukan berbagai bentuk perawatan ruang publik secara mandiri, mulai dari menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas, hingga memperindah area sekitar. Praktik ini mencerminkan kontribusi nyata dari bawah (bottom-up initiative) dalam tata kelola destinasi. Namun, karena belum terintegrasi dalam kerangka perencanaan resmi, kontribusi ini seringkali tidak terdokumentasi, tidak mendapatkan dukungan kebijakan, dan rentan terganggu oleh kebijakan yang tidak inklusif.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif dan pendekatan kebijakan yang dapat menginstansialisasi partisipasi wirausaha lokal, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga keberlanjutan ruang publik pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Lashley, C., & Morrison, A. (2000). *In Search of Hospitality*. Butterworth-Heinemann.

UNWTO. (2019). *Tourism for Sustainable Development in Least Developed Countries*. Madrid: World Tourism Organization.

UNEP & UNWTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers*.

Pranadji, R. (2021). "Keterlibatan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Area Wisata." *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 12(2), 45-58.

Nurhayati, S. (2022). "Sinergi Komunitas Lokal dalam Konservasi Destinasi." *Journal of Community Development*, 5(1), 12-25.